

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen yang menitikberatkan pada masalah pertanggungjawaban setiap tingkat manajer atau unit kerja dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Agar kemungkinan sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat diterapkan, maka ada beberapa persyaratan elemen-elemen yang harus dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut :

1. Adanya pengelompokan tanggungjawab pengelolaan (departemen-departemen) pada setiap tingkatan dalam organisasi yang didalamnya terdapat desentralisasi.
2. Struktur organisasi yang menetapkan batas wewenang dan tanggungjawab yang jelas dan tegas pada tiap tingkatan manajemen.
3. Anggaran biaya disusun untuk tiap tingkatan manajemen dan dengan menunjukkan biaya-biaya yang dapat tidaknya biaya tersebut dikendalikan (*Controlable cost*) oleh pimpinan setiap bagian atau departemen.

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :Perusahaan Tenun Kusumatex belum dapat menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendali biaya.

Kesimpulan tersebut didukung oleh hal-hal berikut :

1. Perusahaan tenun Kusumatek belum memiliki struktur organisasi yang mengatur secara tegas dan jelas wewenang dan tanggung jawab pada setiap unit organisasi. Pada perusahaan ini belum dibentuk pusat-pusat pertanggungjawaban, pembentukan pusat pertanggungjawaban memerlukan desentralisasi. Desentralisasi berarti pendelegasian wewenang pembuatan keputusan pada tingkat manajemen kedua, jadi belum sampai ke tingkat bagian.
2. Rekening buku besar yang ada di perusahaan Kusumatex belum diklasifikasikan dan diberi kode rekening dalam prosedur pencatatan biaya produksi yang sesuai dengan tingkat manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi.
3. Perusahaan tenun Kusumatex belum menggolongkan biaya ke dalam biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Untuk tujuan penilaian prestasi manajer dalam pengendalian biaya, maka biaya harus digolongkan dalam biaya terkendali dan biaya tidak terkendali.
4. Perusahaan tenun Kusumatex belum menyusun anggaran untuk setiap jenjang manajemen, sehingga prestasi

manajer setiap pusat pertanggungjawaban tidak dapat dinilai. Agar tujuan akuntansi pertanggungjawaban tercapai maka suatu organisasi harus menggolongkan pendapatan dan biaya sesuai dengan berbagai jenjang manajemen yang bertanggungjawab. Oleh karena itu anggaran harus disusun untuk setiap jenjang manajemen yang dibebani tanggungjawab atas biaya tersebut. Melalui laporan pertanggungjawaban biaya, anggaran setiap pusat pertanggungjawaban dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat ditentukan prestasi manajer setiap pusat pertanggungjawaban.

5. Sistem pelaporan yang dijalankan perusahaan tenun Kusumatex tidak mendukung diterapkannya sistem akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban dirancang khusus sesuai dengan struktur organisasi untuk dapat menyajikan laporan pertanggungjawaban biaya yang berguna dalam menilai prestasi manajer tingkat pertanggungjawaban tertentu dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perusahaan tenun Kusumatex sebaiknya mengatur secara tegas dan jelas wewenang dan tanggung jawab pada setiap unit organisasi dan menerapkan desentralisasi sampai tingkat bagian sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat oleh pihak yang lebih dekat kepada aktifitas tersebut dibandingkan dengan pengambilan keputusan oleh manajer yang lebih tinggi, yang tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan tersebut.
2. Sistem pengendalian manajemen hubungan pengkodean rekening dan prosedur pencatatan biaya produksi diupayakan sesuai dengan pusat-pusat pertanggungjawaban, agar fungsi sistem pengkodean biaya berdasarkan terjadinya biaya pada pusat biaya.
3. Sistem pelaporan yang dijalankan disarankan untuk disempurnakan sehingga mendukung diterapkannya sistem akuntansi pertanggungjawaban, sehingga biaya yang terjadi pada setiap bagian dapat dievaluasi dan pelaporan biaya hendaknya dilakukan secara periodik agar penyimpangan biaya yang terjadi dapat diketahui lebih dini dan dapat dicarikan jalan pemecahannya.
4. Anggaran perusahaan sebaiknya disusun untuk setiap jenjang manajemen sehingga prestasi manajer pusat pertanggung jawaban dapat dinilai dan selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasinya dapat diketahui penyebabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony Robert N. and John Dearden, Management Control System, Richard D. Irwin, Inc., USA, 1992.
- Arief Suadi, Petunjuk Singkat Menulis Skripsi, Badan Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.
- Charles T. Hongren, Cost Accounting A Managerial Emphasis, Terjemahan Erwan Dukat, Yogyakarta: AK Group.
- D. Harnanto, Akuntansi Untuk Usahawan, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1981.
- Gunawan Adisaputra dan Marwan Asri, Anggaran Perusahaan Jilid I, Yogyakarta:BPFE UGM, 1995.
- C. Roliin Niswonger, Philip E. Fess, Carl S. Warren, Prinsip-Prinsip Akuntansi, Penerbit Erlangga, Jakarta 1994.
- Matz and Usry, Akuntansi Biaya Perencanaan dan Pengawasan, Jilid I, Surabaya: Erlangga, 1984.
- Mulyadi, Sistem Akuntansi, Yogyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 1989.
- , Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa, Yogyakarta: BPSTIE YKPN, 1992.
- Mulyadi dan R.A.Supriyono, Akuntansi Manajemen, Yogyakarta: BPFE UGM, 1988.
- R.A.Supriyono, Akuntansi Biaya: Pengumpulan dan Penentuan Harga Pokok, Yogyakarta: BPFE UGM, 1987.
- , Akuntansi Biaya: Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Serta Data Relevan Untuk Pengambilan Keputusan, Yogyakarta: BPFE UGM, 1987.
- , Akuntansi Manajemen I: Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Dan Proses Perencanaan, Yogyakarta: BPFE UGM, 1987.
- , Akuntansi Manajemen 2: Struktur Pengendalian Manajemen, Yogyakarta: BPFE UGM, 1989.
- , Akuntansi Manajemen 3: Proses Pengendalian Manajemen, Yogyakarta: BPFE UGM, 1989.
- Sugiarto, Susunan Dan Kode Rekening, Yogyakarta: BPFE UGM, 1979.